

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2021**

**Jl. Pembangunan No. 7 Rantau Telp. 0517 – 31052, 31510  
Fax. 0517-31052 Rantau Kabupaten Tapin Kode Pos 71111  
Email : [bppkb.tapin@gmail.com](mailto:bppkb.tapin@gmail.com)**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 LandasanHukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2019.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Rentra SKPD.....	6
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD .....	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD DPPKB .....	25
3.3 Program dan kegiatan .....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	37
BAB V PENUTUP .....	40


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai program prioritas yang telah disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin.

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi segenap pihak yang berkepentingan, terutama dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Tapin.

Rantau, Juli 2020  
Kepala  
  
**NOOR IFANSYAH, SKM, MS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660723 198903 1 012

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 , merupakan bentuk pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . Undang – Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) SKPD , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) tahun 2020.

Rencana Kerja ( Renja ) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat kebijaksanaan , Program dan Kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unit kerja perencanaan tugas ,fungsi , kewenangan serta tanggung jawab di bidang keluarga berencana, bidang ketahanan kesejahteraan keluarga dan bidang pengendalian penduduk dan penyuluhan diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah .oleh karena itu diperlukan tenaga yang handal dan dengan di dukung aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga sasaran dan prioritas dapat dicapai untuk peningkatan pembangunan di daerah.

Dalam Rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , maka disusunlah Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah( lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Anatar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107 );
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah , tata cara evaluasi, Rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014 – 2034;
20. Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 03 Oktober 2016.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
23. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/01-Randal/Bappelitbang/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dan mengacu kepada RKPD Tahun 2021.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Dari Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2021, yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun ke lima yang merupakan tujuan akhir perencanaan pembangunan lima tahunan.
2. Tersusunnya Tujuan ,Sasaran Peningkatan Pelayanan, Target Capaian Kinerja , serta Pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
5. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
6. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
7. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja .

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun 2021 secara garis besar memuat 5 (Lima) BAB yang terdiri dari :

1. BAB I : PENDAHULUAN  
Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, Landasan hukum, serta Sistematik penulisan;
2. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019  
Berisikan tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan capaian tahun 2020
3. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SKPD  
Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;
4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
Berisikan tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan
5. BAB V : PENUTUP



## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DPPKB, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 10 Program dan 44 Kegiatan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun-tahun sebelumnya.

### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKB TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kab. Tapin tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian ( review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu ( tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun – tahun sebelumnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel.2.1 berikut ini :



**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin**

No	Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(7/8)	10	11	12=(11/5)
<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>												
1	2 08 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
	2 08 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
	2 08 01 01 03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
	2 08 01 01 05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
	2 08 01 01 06	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100

	2 08 01 01 08	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian makanan dan minuman rapat bulanan m	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
	2 08 01 01 09	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas luar daerah dan da	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
	2 08 01 01 10	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo	kali	1	1	1	1	100	1	1	100
	2 08 01 01 11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
	2 08 01 01 12	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihankeamanan kantor dan bahan pembersih	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
2	2 08 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
	2 08 01 02 01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (roda 4 dan 2)	Unit	48	48	48	48	100	48	48	100
	2 08 01 02 02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
	2 08 01 02 05	Pengadaan Tanah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah	kali	0	0	1	0	0	0	0	
3	2 08 01 03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
	2 08 01 03 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	13	13	13	13	100	13	13	100
	2 08 01 03 02	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	laporan	2	2	2	2	100	2	2	100

4	2 08 01 04	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi	Persentase Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49) Tahun	%	2,07	2	2,11	2,28	92,54	2,1	2,1	101,45
	2 08 01 04 02	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
	2 08 01 04 03	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	Akseptor	608		300	300	100	300	300	49,34
	2 08 01 04 04	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	orang	130	6	6	6	100	6	6	4,62
	2 08 01 04 05	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi Kb	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	bulan	12		12	12	100	12	12	100
	2 08 01 04 07	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan kegiatan monitoring Evaluasi alat Obat dan Kontrasepsi KB	kec	12		12	12	100	12	12	100
	2 08 01 04 08	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kesertaan KB dan Kespro	orang	26	26	26	26	100	26	26	100
	2 08 01 04 09	Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	bulan	12		12	12	100	12	12	100
5	2 08 01 05	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	%	8,83	7,58	8,9	17,22	193,48	8,88	8,88	100,57
	2 08 01 05 05	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes	kali	1		1	0	0	1	1	100
	2 08 01 05 06	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kesertaan KB MKJP daerah terpencil	orang	225		60	60	100	60	60	26,67
6	2 08 01 06	Program Generasi Berencana ( Genre)	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) yang aktif	%	71,12	66,07	66,12	66,12	100	67,02	67,02	94,24
			Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	%	92,8	90,02	91,1	91,18	100,09	92,28	92,28	99,44

	2 08 01 06 01	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba kelompok PIK remaja kelompok dan kader BKR	kali	3	3	3	3	100	3	3	100
	2 08 01 06 02	Jambore dan ajang kreativitas PIK-Remaja	Jumlah pelaksanaan kegiatan jambore dan ajang kreativitas PIK-remaja	kali	3	3	3	3	100	3	3	100
	2 08 01 06 05	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja dan kelompok BKR	Kelompok	16	16	16	16	100	16	16	100
	2 08 01 06 07	Orientasi / Pelatihan bagi Remaja Pengurus PIK Remaja dan BKR	Jumlah Pelaksanaan Orientasi / Pelatihan bagi Remaja Pengurus PIK Remaja dan BKR	bulan	12		12	12	100	12	12	100
7	2 08 01 07	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga berKB yang aktif dalam BKL	%	73,66	71,86	71,91	85,42	118,79	72,11	72,11	97,90
			Persentase Keluarga berKB yang aktif dalam BKB	%	84,07	83,83	83,88	86,63	103,28	83,93	83,93	99,83
			Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	%	92,19	91,99	92,04	89,94	97,72	92,07	92,07	99,87
	2 08 01 07 01	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan kegiatan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	kali	3	3	3	3	100	3	3	100
	2 08 01 07 02	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (U	Kelompok	32		32	32	100	32	32	100
	2 08 01 07 03	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional	kali	3	3	3	3	100	3	3	100
	2 08 01 07 04	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional	kali	2	2	2	2	100	2	2	100
	2 08 01 07 06	Lomba kelompok BKB, BKL, dan Orang Tua Hebat	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKB, BKL dan orang tua hebat	kali	3		3	3	100	3	3	100

	2 08 01 07 07	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK	kali	3	3	3	100	3	3	100	
	2 08 01 07 10	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan kelompok bina keluar	Kelompok	2	2	2	100	2	2	100	
	2 08 01 07 11	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	kali	3	3	3	100	3	3	100	
	2 08 01 07 12	Peningkatan Keterampilan Pemanfaatan Alat Permainan Edukatif (APE)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Pemanfaatan Alat Permainan Edukatif (APE)	Kali	1	1	1	100				
	2 08 01 07 13	Seminar Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Pelaksanaan Seminar Tumbuh Kembang Anak	Kali		1	1	100				
	2 08 01 07 14	Seminar Pernikahan Dini	Jumlah Pelaksanaan Seminar Pernikahan Dini	Kali		1	1	100				
8	2 08 01 08	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi Kependudukan	%	85	60	65	53	81,54	70	70	82,35
	2 08 01 08 02	Pembinaan Koalisi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan koalisi kependudukan	orang	180	180	0	0	180	180	100	
9	2 08 01 09	Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	%	85	60	65	65	100	70	70	82,35
	2 08 01 09 01	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB	Dokumen	240	240	240	240	100	240	240	100
10	2 08 01 10	Program Advokasi dan Penggerakan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra Kerja	%	50	20	30	30	100	35	35	70
	2 08 01 10 01	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan advokasi	bulan	12	12	12	12	100	12	12	100

	2 08 01 10 03	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi kampung KB	orang	250	250	250	250	100	250	250	100
	2 08 01 10 04	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	bulan			12	12	100	12		



## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Capaian Kinerja		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur			2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,19	2,16	100	99,1	
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpebuhi (Unmeed Need)			9,11	9,88	9,84	9,82	9,76	9,7	9,11	8,93	100	90,4	
3	Persentase Peningkatan Kesertaan Ber-KB (CPR)			82,98	83,12	83,2	83,2	83,25	83,3	83	82,23	98,9	98,9	
4	Persentase Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam program KKBPK			70	72	75	77	80	85	70	76,69	100	107	

### **2.3. ISU –ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD**

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sering dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut seringkali menjadikan tugas dan fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik. Beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin adalah :

1. Terbatasnya aparatur yang dimiliki Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dengan jumlah hanya 13 ( tiga belas ) orang struktural , 4 ( empat ) orang Staf dan 26 orang tenaga fungsional penyuluh KB (1 orang penyuluh membina 4 desa ) dimana untuk penyuluh KB sudah menjadi pegawai pusat sejak Tahun 2018.
2. Belum optimal pelaksanaan kegiatan operasional program
3. Masih rendahnya peran serta pria dalam mengikuti program Keluarga Berencana

### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang di capai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan arahan dari kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2021 Kabupaten Tapin**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2020**

Rencana Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.566.931.327	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	922.335.432	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	TAPIN	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	1.050.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	TAPIN	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	77.184.100	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	54.450.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	84.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	28.222.300	
4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	31.000.000	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.400.000	

5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	27.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.000.000	
6	Penyediaan makanan dan minuman	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan	105.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan	65.340.000	
7	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	1.136.449.025	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	618.420.532	
8	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	12 Bulan	53.482.302	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	12 Bulan	45.318.500	
9	Tapin Expo	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali	20.000.000	Tapin Expo	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali	20.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	115.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	114.500.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43 Unit	115.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43 Unit	109.500.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	5.000.000	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	33.500.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	8.360.000	

1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 Laporan	18.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 Laporan	5.000.000	
2	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	2 Laporan	15.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	2 Laporan	3.360.000	
IV	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Persentase peserta KB aktif MKJP	8,87%	0	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Persentase peserta KB aktif MKJP	8,87%	62.461.000	
1	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	TAPIN	Jumlah pelaksanaan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes	1 Kali	0	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	TAPIN	Jumlah pelaksanaan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes	1 Kali	13.600.000	
2	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana	150 Orang	0	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana	150 Orang	27.284.000	
3	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	4 Kali	0	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	4 Kali	21.577.000	
V	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi		Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,09%	1.268.257.363	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi		Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,09%	135.309.000	
1	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	TAPIN	Waktu pelaksanaan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu	12 Bulan	245.590.625	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	TAPIN	Waktu pelaksanaan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu	12 Bulan	25.500.000	

2	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	250 Akseptor	285.220.300	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	250 Akseptor	31.809.000	
3	Pelayanan KB Medis Operasi	TAPIN	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	130 Orang	253.697.500	Pelayanan KB Medis Operasi	TAPIN	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	130 Orang	26.850.000	
4	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	1 Kali	46.822.438	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	1 Kali	21.050.000	
5	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	2 kali	220.997.500	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	2 kali	10.500.000	
6	Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	12 Bulan	0	Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	12 Bulan	100.000	
7	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	TAPIN	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	12 Bulan	215.929.000	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	TAPIN	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	12 Bulan	19.500.000	
VI	Program Generasi Berencana (Genre)		Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	68,02% 92,36%	0	Program Generasi Berencana (Genre)		Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	68,02% 92,36%	76.550.000	
1	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	3 Kali	0	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	3 Kali	17.880.000	

2	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	12 Bulan	0	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	12 Bulan	49.355.000	
3	Ajang Kreativitas PIK-Remaja	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Ajang Kreativitas PIK-Remaja	3 Kali	0	Ajang Kreativitas PIK-Remaja	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Ajang Kreativitas PIK-Remaja	3 Kali	9.315.000	
VII	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	92,09% 83,98% 73,61%	0	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	92,09% 83,98% 73,61%	364.998.500	
1	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	TAPIN	Jumlah pelaksanaan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	0	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	TAPIN	Jumlah pelaksanaan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	12.330.000	
2	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional	3 Kali	0	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi / Nasional	TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional	3 Kali	17.905.000	
3	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	TAPIN	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional	2 Kali	0	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	TAPIN	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional	2 Kali	5.080.000	
4	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK	3 Kali	0	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK	3 Kali	20.238.000	

5	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	12 Bulan	0	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	12 Bulan	26.730.000	
6	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKB, BKL dan orang tua hebat	3 Kali	0	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKB, BKL dan orang tua hebat	3 Kali	23.270.000	
7	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	TAPIN	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL)	2 Kelompok	0	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	TAPIN	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL)	2 Kelompok	249.072.500	
8	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	0	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	10.373.000	
VII I	Program Pengendalian Penduduk		Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	75%	0	Program Pengendalian Penduduk		Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	75%	29.250.000	
1	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	11 Sekolah	0	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	11 Sekolah	22.910.000	
2	Pembinaan Koalisi Kependudukan	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Koalisi Kependudukan	1 Kali	0	Pembinaan Koalisi Kependudukan	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Koalisi Kependudukan	1 Kali	6.340.000	



IX	Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan		Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80%	0	Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan		Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80%	41.750.000	
1	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB	160 Dokumen	0	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB	160 Dokumen	41.750.000	
X	Program Advokasi dan Penggerakan		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	40%	0	Program Advokasi dan Penggerakan		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	40%	147.855.000	
1	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	TAPIN	Waktu pelaksanaan penyebarluasan informasi dan advokasi	12 Bulan	0	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	TAPIN	Waktu pelaksanaan penyebarluasan informasi dan advokasi	12 Bulan	37.715.000	
2	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	12 Bulan	0	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	12 Bulan	60.290.000	
3	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	2 Kali	0	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	2 Kali	49.450.000	
4	Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	12 Bulan	0	Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	12 Bulan	100.000	
5	Pembentukan Rumah Dataku	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Rumah Dataku	12 Bulan	0	Pembentukan Rumah Dataku	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Rumah Dataku	12 Bulan	100.000	
6	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	12 Bulan	0	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	12 Bulan	100.000	

7	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	12 Bulan	0	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	TAPIN	Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	12 Bulan	100.000	
---	--	-------	--	----------	---	--	-------	--	----------	---------	--

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin selama tahun 2021 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan – kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah .

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

##### **a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP ( Rancangan awal ) , yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021 yang terkait untuk menunjukkan Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA , yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga ,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif , demokratis dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat , dan Terpercaya,
5. Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan Masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan Produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia Lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan Revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Pada Perencanaan Pembangunan Jangka panjang daerah kabupaten Tapin tahun 2005 -2025 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari Internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru – paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah – tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, Regional ASEAN , hingga global atau Internasional. Dalam Koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksportor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level Internasional , selain sebagai paru –paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada Perencanaan Pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah :

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru –paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis , hutan lindung, dan hutan produksi , serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi Nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi batubara terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing – masing Provinsi;
3. Pengembangan Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi , gas alam cair , pasir zirkon, dan pasir kuarsa ; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan adalah mendorong percepatan dan Perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing – masing melalui :

1. Pengembangan Hilirisasi Komoditas Batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit , Karet , bauksit , bijih besi , gas alam cair, pasir zirkon , dan pasir kuarsa ;
2. Penyediaan Infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus

## **b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu Internasional, isu dan kebijakan Strategis nasional, Isu dan Kebijakan Strategis Provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Pembangunan Provinsi Kalimantan selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sustainability Development sebagai Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun.

Sasaran (Objektivitas) bersifat spesifik dan terukur satu tujuan dapat mempunyai lebih dari satu sasaran. Sasaran berjangka pendek dan mencerminkan cara mencapai tujuan dan mensukseskan rencana. Sasaran diikuti dengan indikator sasaran yang merupakan tanda ukuran, kriteria yang menyatakan apakah suatu sasaran yang lebih ditetapkan tercapai atau tidak, maka ditetapkan sasaran dan indikator sasaran .

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPPKB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun

2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah DPPKB Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pelayanan Sekretariat
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan
- 3) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan, semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sebagai langkah untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Meningkatnya Kesertaan ber-KB
3. Terkendalinya Angka Kelahiran
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran DPPKB Kabupaten Tapin**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	69,72	69,72	70,42	71,12	71,83	72,55	73,28
		Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeed Need)	9,92	9,11	9,88	9,84	9,82	9,76	9,70

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
						PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase Peningkatan Kesertaan Ber-KB (CPR)	82,88	82,98	83,12	83,16	83,20	83,25	83,30
		Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14
<b>3</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa</b>		<b>Indeks desa membangun (poin)</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,56</b>	<b>0,57</b>	<b>0,59</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK )	Persentase Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam program KKBPK	65	70	72	75	77	80	85



### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuandan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai Kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program dan kegiatan , diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan – Permasalahan yang dihadapi, Menjawab tantangan Pembangunan, serta Memaksimalkan Peluang yang ada.

Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta Prognosisnya dapat dilihat pada Lampiran dibawah ini .

**Tabel 3.3**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TAHUN 2021**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2022**  
**KABUPATEN TAPIN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2021 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2022		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						1.903.368.932	0	0		1.998.537.379	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	8											
2	8	1				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	922.335.432	0	0	100	968.452.204
2	8	1	2		TAPIN	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	77.184.100	0	0	12 Bulan	81.043.305
2	8	1	7		TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	54.450.000	0	0	12 Bulan	57.172.500
2	8	1	10		TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	28.222.300	0	0	12 Bulan	29.633.415

2	8	1	11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.400.000	0	0	12 Bulan	9.870.000
2	8	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.000.000	0	0	12 Bulan	4.200.000
2	8	1	17	Penyediaan makanan dan minuman			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan	65.340.000	0	0	11 Bulan	68.607.000
2	8	1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	618.420.532	0	0	12 Bulan	649.341.559
2	8	1	19	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	12 Bulan	45.318.500	0	0	12 Bulan	47.584.425
2	8	1	20	Tapin Expo			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali	20.000.000	0	0	1 Kali	21.000.000
2	8	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	114.500.000	0	0	100	120.225.000
2	8	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43 Unit	109.500.000	0	0	48 Unit	114.975.000
2	8	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	Bulan	5.250.000
2	8	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	8.360.000	0	0	100	8.778.000

2	8	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 Laporan	5.000.000	0	0	13 Laporan	5.250.000
2	8	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	2 Laporan	3.360.000	0	0	2 Laporan	3.528.000
2	8	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				Persentase peserta KB aktif MKJP	8,87%	62.461.000	0	0	8,86	65.584.050
2	8	18	6	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes			TAPIN	Jumlah pelaksanaan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes	1 Kali	13.600.000	0	0	1 Kali	14.280.000
2	8	18	9	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil			TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana	150 Orang	27.284.000	0	0	150 Orang	28.648.200
2	8	18	10	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	4 Kali	21.577.000	0	0	4 Kali	22.655.850
2	8	25		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi				Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,09%	135.309.000	0	0	2,08	142.074.450
2	8	25	2	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu			TAPIN	Waktu pelaksanaan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu	12 Bulan	25.500.000	0	0	12 Bulan	26.775.000
2	8	25	3	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	250 Akseptor	31.809.000	0	0	250 Akseptor	33.399.450

2	8	25	4	Pelayanan KB Medis Operasi			TAPIN	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	130 Orang	26.850.000	0	0	130 Orang	28.192.500
2	8	25	9	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	1 Kali	21.050.000	0	0	1 Kali	22.102.500
2	8	25	12	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	2 kali	10.500.000	0	0	2 kali	11.025.000
2	8	25	13	Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	12 Bulan	100.000	0	0		105.000
2	8	25	14	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB			TAPIN	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	12 Bulan	19.500.000	0	0	12 Bulan	20.475.000
2	8	26		Program Generasi Berencana (Genre)				Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	68,02% 92,36%	76.550.000	0	0	92,56	80.377.500
2	8	26	1	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	3 Kali	17.880.000	0	0	Kali	18.774.000
2	8	26	5	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	12 Bulan	49.355.000	0	0	Bulan	51.822.750
2	8	26	10	Ajang Kreativitas PIK-Remaja			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Ajang Kreativitas PIK-Remaja	3 Kali	9.315.000	0	0	Kali	9.780.750

2	8	27		Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	92,09% 83,98% 73,61%	364.998.500	0	0	73,11	383.248.425
2	8	27	1	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	12.330.000	0	0	3 Kali	12.946.500
2	8	27	3	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional			TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional	3 Kali	17.905.000	0	0	3 Kali	18.800.250
2	8	27	4	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional			TAPIN	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional	2 Kali	5.080.000	0	0	2 Kali	5.334.000
2	8	27	9	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK			TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK	3 Kali	20.238.000	0	0	3 Kali	21.249.900
2	8	27	13	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	12 Bulan	26.730.000	0	0	12 Bulan	28.066.500
2	8	27	14	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat			TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKB, BKL dan orang tua hebat	3 Kali	23.270.000	0	0	3 Kali	24.433.500
2	8	27	15	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL)	2 Kelompok	249.072.500	0	0	2 Kelompok	261.526.125

2	8	27	16	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	10.373.000	0	0	3 Kali	10.891.650
2	8	28		Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkendalnya Angka Kelahiran		Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	75%	29.250.000	0	0	80	30.712.500
2	8	28	1	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	11 Sekolah	22.910.000	0	0	11 Sekolah	24.055.500
2	8	28	2	Pembinaan Koalisi Kependudukan			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Koalisi Kependudukan	1 Kali	6.340.000	0	0	1 Kali	6.657.000
2	8	29		Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan				Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	80%	41.750.000	0	0	85	43.837.500
2	8	29	1	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB			TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB	160 Dokumen	41.750.000	0	0	160 Dokumen	43.837.500
2	8	30		Program Advokasi dan Penggerakan				Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	40%	147.855.000	0	0	45	155.247.750
2	8	30	1	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi			TAPIN	Waktu pelaksanaan penyebarluasan informasi dan advokasi	12 Bulan	37.715.000	0	0	12 Bulan	39.600.750

2	8	30	3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	12 Bulan	60.290.000	0	0	12 Bulan	63.304.500
2	8	30	12	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	2 Kali	49.450.000	0	0	2 Kali	51.922.500
2	8	30	13	Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	12 Bulan	100.000	0	0	12 Bulan	105.000
2	8	30	14	Pembentukan Rumah Dataku			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Rumah Dataku	12 Bulan	100.000	0	0	12 Bulan	105.000
2	8	30	15	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	12 Bulan	100.000	0	0	12 Bulan	105.000
2	8	30	16	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	12 Bulan	100.000	0	0	12 Bulan	105.000
<b>TOTAL</b>										<b>1.903.368.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.998.537.379</b>



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengendalian Penduduk merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dalam masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program Prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dan tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian pertanggungjawaban.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-prpgram prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebuuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (otutcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber dana lainnya (APBN)

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2021 (Rp)
				<b>Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>	1.903.368.932
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
2	8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>922.335.432</b>
2	8	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	77.184.100
2	8	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	54.450.000
2	8	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.222.300
2	8	1	11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	9.400.000

2	8	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000
2	8	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	65.340.000
2	8	1	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	618.420.532
2	8	1	19	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	45.318.500
2	8	1	20	Tapin Expo	20.000.000
2	8	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	114.500.000
2	8	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	109.500.000
2	8	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000
2	8	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.360.000
2	8	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000
2	8	6	5	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	3.360.000
2	8	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	62.461.000
2	8	18	6	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	13.600.000
2	8	18	9	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	27.284.000
2	8	18	10	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	21.577.000
2	8	25		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi	135.309.000
2	8	25	2	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	25.500.000
2	8	25	3	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	31.809.000
2	8	25	4	Pelayanan KB Medis Operasi	26.850.000
2	8	25	9	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	21.050.000
2	8	25	12	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	10.500.000
2	8	25	13	Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	100.000
2	8	25	14	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	19.500.000
2	8	26		Program Generasi Berencana (Genre)	76.550.000
2	8	26	1	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	17.880.000
2	8	26	5	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	49.355.000
2	8	26	10	Ajang Kreativitas PIK-Remaja	9.315.000
2	8	27		Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	364.998.500
2	8	27	1	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	12.330.000
2	8	27	3	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	17.905.000
2	8	27	4	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	5.080.000
2	8	27	9	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	20.238.000
2	8	27	13	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	26.730.000
2	8	27	14	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	23.270.000

2	8	27	15	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	249.072.500
2	8	27	16	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	10.373.000
2	8	28		Program Pengendalian Penduduk	29.250.000
2	8	28	1	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	22.910.000
2	8	28	2	Pembinaan Koalisi Kependudukan	6.340.000
2	8	29		Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan	41.750.000
2	8	29	1	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	41.750.000
2	8	30		Program Advokasi dan Penggerakan	147.855.000
2	8	30	1	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	37.715.000
2	8	30	3	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	60.290.000
2	8	30	12	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	49.450.000
2	8	30	13	Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	100.000
2	8	30	14	Pembentukan Rumah Dataku	100.000
2	8	30	15	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	100.000
2	8	30	16	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	100.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.903.368.932</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini merupakan dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis ( Renstra) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang merupakan Rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rencana Kerja Memuat tujuan dan sasaran ,Program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Dengan Mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Penyusunan Renja Diharapkan mampu Mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik diintern SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dilingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan didalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi dan Misi kepala daerah periode 2018-2023 yaitu “ Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis “.

**BUPATI TAPIN,**

**H.M. ARIFIN ARPAN**